

## PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR MELALUI PEMANFAATAN DANA DESA DI DESA TANJUNG PUDE KECAMATAN UNA-UNA KABUPATEN TOJO UNA-UNA

Adelina Fiolita Muhamad<sup>1</sup>, Lisda Va Gobel<sup>2</sup>, Mishahudi Djaba<sup>3</sup>

<sup>123</sup>Universitas Bina Taruna Gorontalo

[adelinafiolitam@gmail.com](mailto:adelinafiolitam@gmail.com)

Received: 30-07- 2025

Revised: 20-08-2025

Approved: 28-08-2025

### ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembangunan infrastruktur melalui pemanfaatan Dana Desa di Desa Tanjung Pude, Kecamatan Una-Una, Kabupaten Tojo Una-Una, dengan fokus pada aspek transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap tujuh informan yang terdiri dari perangkat desa, anggota BPD, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi telah diupayakan melalui musyawarah desa dan penyediaan informasi publik, namun masih kurang efektif karena rendahnya partisipasi dan keterbatasan akses informasi. Akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan menghadapi kendala berupa keterlambatan laporan, ketidaklengkapan data teknis, serta pengawasan BPD yang belum menyentuh aspek keuangan. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan juga masih rendah, karena sebagian besar warga hanya aktif pada tahap perencanaan namun pasif saat pelaksanaan berlangsung. Simpulan penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun struktur dan mekanisme pembangunan desa telah diterapkan, efektivitas pelaksanaannya belum optimal karena lemahnya partisipasi dan pengawasan masyarakat terhadap proses penggunaan Dana Desa.*

**Kata Kunci:** Dana Desa, Infrastruktur, Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat

### PENDAHULUAN

Sistem Pemerintahan Yang Ada Dan Berlaku Pada Saat Ini Adalah Desa Mempunyai Wewenang Yang Penting Dalam Membantu Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintahan, Termasuk Pembangunan Dan Pelaksanaan Otonomi Daerah. Tujuan Dari Kebijakan Otonomi Daerah Adalah Memberi Peluang Dan Kesempatan Bagi Terwujudnya Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Didaerah, Yang Berarti Pelaksanaan Tugas Tugas Pemerintah Daerah Harus Didasarkan Pada Prinsip : Efektif, Efisien, Dan Terbuka. Menurut Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Desa Memberikan Kesempatan Kepada Masyarakat Desa Untuk Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri, Dengan Persyaratan Yang Di Amanatkan Dalam Undang-Undang Tersebut, Yakni Di Selenggarakan Dengan Memperhatikan Prinsip-Prinsip Demokrasi, Peran Serta Masyarakat, Pemerataan, Keadilan, Serta Memperhatikan Potensi Dan Keaneka-Ragaman Daerah.

Landasan Pemikiran Dalam Peraturan Mengenai Desa Adalah Keanekaragaman, Partisipasi, Otonomi Asli, Demokratisasi Dan Pemberdayaan Masyarakat. Desa Diberikan Wewenang Yang Luas Untuk Memanfaatkan Dana Desa Sepenuhnya Demi Kemajuan Dan Kemakmuran Desanya. Wewenang Ini Diberi Kepada Masing-Masing Desa Karena Tentunya Desa Memiliki Potensi Berbeda Dan Kebijakan Harus Disesuaikan Dengan Kondisi Masing-Masing Desa. Salah Satu Instrumen Penting Dalam Pembangunan Yang Wajib Disediakan Pemerintah Adalah Ketersediaan Infrastruktur Karena Infrastruktur Merupakan Kebutuhan Dasar Masyarakat Yang Harus Terpenuhi Untuk Menopang Aktivitas Sosial Dan Ekonomi Masyarakat. Keberhasilan Suatu Pembangunan Adalah Hasil Dari Keberhasilan Suatu Perencanaan, Maka Salah Satu

Keberhasilan Otonomi Daerah Dapat Dilihat Dari Pembangunan, Seperti Terpenuhnya Pembangunan Infrastruktur Bagi Masyarakat. Idealnya, Dana Desa Diharapkan Bisa Membantu Pemerintah Desa Untuk Mewujudkan Kebijakan Dan Pembangunan Infrastrukturnya. Pada Akhirnya Hal Ini Bisa Membantu Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Desa. Dana Desa Merupakan Dana Yang Sumbernya Berasal Dari Apbn, Yang Kemudian Transfer Melalui Apbd Kabupaten/Kota Yang Nantinya Bertujuan Mendanai Untuk Berbagai Kegiatan-Kegiatan Desa Seperti Pembangunan, Pemberdayaan Serta Pemerintahan Desa. Pemberian Dana Desa Pada Masing-Masing Desa Berbeda-Beda, Tergantung Dari Kondisi Desa Itu Sendiri. Tujuan Dana Desa Pada Prinsipnya Adalah Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Dan Pemerataan Pembangunan Desa Melalui Peningkatan Pelayanan Publik Di Desa, Memajukan Perekonomian Desa, Mengatasi Kesenjangan Pembangunan Antara Desa Serta Memperkuat Masyarakat Desa Sebagai Subjek Dari Pembangunan.

Pembangunan Desa Merupakan Salah Satu Prioritas Utama Dalam Upaya Pemerataan Pembangunan Di Indonesia, Terutama Dengan Adanya Program Dana Desa Yang Disalurkan Oleh Pemerintah Pusat. Dana Desa Diharapkan Dapat Mendorong Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Desa Melalui Pembangunan Infrastruktur, Peningkatan Sdm, Serta Pemberdayaan Ekonomi Lokal. Salah Satu Program Pemerintah Dalam Mendukung Pembangunan Desa Yaitu Dengan Mengeluarkan Dana Desa Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Desa. Sebagaimana Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 72 Menyatakan Bahwa Dana Desa Merupakan Salah Satu Sumber Pendapatan Desa Yang Bersumber Dari Apbn. Dana Desa Merupakan Bentuk Kongkrit Pengakuan Negara Terhadap Hak Asal- Usul Desa Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. egitu Penting Dan Strategisnya Dana Desa, Sehingga Wajar Apabila Dana Desa Mendapat Perhatian Yang Sangat Besar Dari Publik, Karena Nilai Nominalnya Yang Relatif Besar.

Sementara Banyak Pihak Yang Merasa Was- Was Terhadap Kompetensi Dan Kapabilitas Perangkat Desa Dalam Pengelolaan Dana Tersebut. Desa Tanjung Pude Kecamatan Una-Una Kabupaten Tojo Una-Una Merupakan Salah Satu Desa Yang Terletak Di Provinsi Sulawesi Tengah Dengan Jumlah Penduduk 371 Jiwa Dimana Pembangunan Infrastruktur Mencakup Berbagai Sektor Penting Yang Sangat Dibutuhkan Oleh Masyarakat Desa, Seperti Pembangunan Dan Perbaikan Jalan Lingkungan, Sarana Air Besih, Serta Pembangunan Fasilitas Umum Seperti Posyandu, Balai Desa, Sarana Olahraga. Pembangunan Infrastruktur Ini Menjadi Fondasi Utama Untuk Mendukung Aktivitas Ekonomi Masyarakat Desa. Tujuan Dari Pembangunan Infrastruktur Di Desa Tanjung Pude Untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Warga, Meningkatkan Produktifitas Ekonom, Serta Menciptakan Kehidupan Yang Lebih Layak Dan Sejahtera.

**Tabel 1.**  
**Anggara Dana Desa**

<b>Tahun</b>	<b>Add</b>	<b>Dds</b>	<b>Pbh</b>
2023	Rp.478.442.991	Rp.713.903.00	Rp.6.820.708
2024	Rp.600.643.610	Rp.579.492.000	Rp.30.385.582
2025	Rp.535.487.000	Rp.568.122.000	Rp.41.459.107

Dari Data Anggaran Dana Desa Di Atas Menunjukkan Bahwa:

- 1) Pada Tahun 2023 Anggaran Dana Desa (Add) Di Desa Tanjung Pude Berjumlah Rp.478.442.991, Dana Desa Subsidi (Dds) Berjumlah

- Rp.713.903.00, Pendapatan Bagi Hasil (Pbh) Berjumlah Rp.6.820.708.
- 2) Pada Tahun 2024 Anggaran Dana Desa (Add) Di Desa Tanjung Pude Berjumlah Rp.600.643.610, Dana Desa Subsidi (Dds) Berjumlah Rp.579.492.000, Pendapatan Bagi Hasil (Pbh) Berjumlah Rp.30.385.582.
  - 3) Pada Tahun 2025 Anggaran Dana Desa (Add) Di Desa Tanjung Pude Berjumlah Rp.535.487.000, Dana Desa Subsidi (Dds) Berjumlah Rp.568.122.000 Pendapatan Bagi Hasil (Pbh) Berjumlah Rp.41.459.107.

Pembangunan Infrastruktur Adalah Suatu Proses Penyediaan Peningkatan Sarana Serta Prasarana Fisik Yang Di Butuhkan Untuk Aktivitas Sosial, Ekonomi, Dan Lingkungan Masyarakat. Infrastruktur Meliputi Berbagai Fasilitas Dasar Seperti Jalan, Jembatan, Air Bersih, Sanitasi, Dan Listrik. Tujuan Dari Pembangunan Infrastruktur Di Desa Tanjung Pude Adalah Untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Warga, Meningkatkan Produktivitas Ekonomi, Serta Menciptakan Kehidupan Yang Lebih Layak Dan Sejahtera. Namun Kenyataannya Sesuai Hasil Observasi Bahwa Masih Ada Beberapa Masalah Yang Terdapat Dilapangan Antara Lain Kurangnya Transparansi Dalam Proses Perencanaan Dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Desa Menjadi Isu Penting. Informasi Terkait Penggunaan Dana, Pelaksanaan Proyek, Serta Hasil-Hasil Pembangunan Tidak Sepenuhnya Disampaikan Secara Terbuka Kepada Masyarakat. Hal Ini Menimbulkan Ketidakpercayaan Publik Serta Menurunkan Partisipasi Aktif Warga Desa.

Selanjutnya Rendahnya Akuntabilitas Aparatur Desa Dalam Mempertanggungjawabkan Pemanfaatan Dana Desa, Khususnya Dalam Proyek Pembangunan Infrastruktur, Memicu Dugaan Adanya Penyimpangan Atau Pemborosan Anggaran, Dan Partisipasi Dalam Halnya Pengawasan Yang Kurang Efektif Dari Berbagai Pihak Baik Dari Masyarakat, Bpd Maupun Pihak Kecamatan Menyebabkan Pelaksanaan Proyek Infrastruktur Tidak Selalu Sesuai Rencana Atau Standar Teknis. Kurangnya Mekanisme Kontrol Dan Monitoring Menyebabkan Kualitas Infrastruktur Tidak Tahan Lama Dan Tidak Optimal Dalam Memenuhi Kebutuhan Masyarakat.”

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Konsep Administrasi**

Administrasi Berdasarkan Etimologis Bersumber Dari Bahasa Latin Yang Terdiri Dari Ad + Ministrare, Yang Secara Operasional Berarti Melayani, Membantu Dan Memenuhi. Dalam Bahasa Asalnya Terbentuk Kata Benda Administration Dan Kata Sifat Administrativus. Sedangkan Dalam Bahasa Inggris Menjadi Administration Dan Dalam Bahasa Indonesia Menjadi Administrasi. Administrasi Dapat Dibedakan Menjadi Dua Pengertian, Yaitu:

- 1) Administrasi Dalam Arti Sempit, Yaitu Berasal Dari Kata Administratie (Bahasa Belanda), Yang Meliputi Kegiatan: Catat-Mencatat, Surat- Menyurat, Pembukuan Ringan, Ketik-Mengetik, Kegiatan Menyusun Keterangan-keterangan Secara Sistematis, Dan Pencatatan- Pencatatannya Secara Tertulis Untuk Didokumentasikan, Agar Mudah Menemukannya Bilamana Akan Dipergunakan Lagi, Baik Secara Terpisah-Pisah Maupun Sebagai Keseluruhan Yang Tidak Terpisahkan, Dan Segala Sesuatu Yang Bersifat Teknis Ketatausahaan (Clerical Work).
- 2) Administrasi Dalam Arti Luas Berasal Dari Kata Administration (Bahasa Inggris), Yaitu: Menurut H. A. Simon Mengemukakan Bahwa “Administration

**As The Activities Of Groups Cooperating To Accomplish Common Goals”**

Administrasi Secara Etimologis Berasal Dari Bahasa Inggris, Administration, Yang Bentuk Infinitifnya Adalah To Administer Yang Diartikan Sebagai To Manage Artinya Mengelola Atau To Direct Artinya Menggerakkan. Istilah, Pengertian, Dan Hakikat Administrasi Di Indonesia Pada Mulanya Berasal Dari Eropa Barat Melalui Penjajahan Belanda, Yang Memperoleh Dari Bangsa Romawi. Administrasi Berdasarkan Istilah-Istilah Romawi Dapat Didefinisikan Sebagai Kegiatan Memberi Bantuan Dalam Mengelola Informasi, Mengelola Manusia, Mengelola Harta Benda Kearah Suatu Tujuan Yang Terhipun Dalam Organisasi. Tugas Administrator Adalah Melayani Atau Menaati, Melaksanakan Tata Usaha (Registrasi, Dokumentasi, Inventarisasi Atau Pencatatan Harta Kekayaan, Serta Kegiatan-Kegiatan Yang Dilakukan) Dan Administro Atau Memimpin Dan Mengarahkan Personel Yang Dipercayakan, Kegiatan Administro Tidak Lain Merupakan Kegiatan Manajemen, Yaitu Proses Pengendalian, Pergerakan Dan Pencatatan Atau Pendayagunaan Fakor-Faktor Sumber Daya Yang Sudah Direncanakan.

Administrasi Publik Merupakan Suatu Bidang Studi Yang Berfokuskan Pada Pelaksanaan Kebijakan Publik Dan Manajemen Organisasi Publik Yang Bertujuan Untuk Memastikan Layanan Publik Yang Diberikan Sesuai Dengan Kebutuhan Masyarakat, Menurut Rosenbloom Sarjito, 2024) (Sarjito, 2024) Administrasi Publik Yaitu Seni Dan Ilmu Manajemen Dalam Sektor Publik, Dengan Tujuan Untuk Mengimplementasikan Kebijakan Publik Secara Optimal. Tidak Hanya Dalam Pelaksanaan Kebijakan, Administrasi Publik Juga Mencakup Berbagai Fungsi Manajerial Seperti Perencanaan, Pengorganisasian, Pengarahan Dan Pengawasan Mengenai Program-Program Publik. Bagi Masyarakat Umum, Administarsi Publik Sebagai Pelayanan Publik. Ada Juga Yang Menganggap Administrasi Publik Adalah Suatu Kegiatan Eksekutif Pemerintah. Istilah Administrasi Dalam Bahasa Inggris Disebut Dengan Administration. Sedangkan Istilah Administrasi Itu Sendiri Berasal Dari Bahasa Latin “Ad” Dan “Ministrate” Yang Artinya “Melayani” Atau “Memenuhi”. . . Administrasi Dibedakan Menjadi Dua, Yaitu :

- 1) Administrasi Dalam Arti Sempit, Berasal Dari Kata Administratie (Bahasa Belanda), Yang Memiliki Arti Suatu Kegiatan Catat-Mencatat, Ketik-Mengetik, Surat Menyurat, Pembukuan Ringan, Dan Segala Sesuatu Yang Bersifat Teknis Ketatausahaan.
- 2) Administrasi Dalam Arti Luas Adalah Kegiatan Dari Sekelompok Orang Yang Mengadakan Kerja Sama Untuk Menyelesaikan Tujuan Bersama.

Menurut Hughes (Hisamuddin & Andriani, 2023)(Hisamuddin & Andriani, 2023) Mendefiiskan Bahwa Administrasi Publik Sebagai Aktivitas Melayani Publik Untuk Melaksanakan Kebijakan Yang Dibuat Oleh Pihak Lain. Pelaksanaannya Berkaitan Dengan Mengelola Sumber Daya Yang Ada Secara Terstruktur Untuk Menangani Hal-Hal Yang Berhubungan Dengan Kepentingan Rakyat, Sehingga Mampu Memenuhi Kebutuhan Rakyat Dan Memberikan Solusi. Mccurdy (Dalam Keban 2014) Mengemukakan Bahwa Administrasi Publik Dapat Dilihat Sebagai Suatu Poses Politik, Yaitu Sebagai Salah Satu Cara Metode Memerintah Suatu Negara Dan Dapat Juga Dianggap Sebagai Cara Yang Prinsipil Untuk Melakukan Berbagai Fungsi Negara. Dengan Kata Lain Administrasi Publik Bukan Hanya Sekedar Persoalan Manajerial Tetapi Juga Persoalan Politik. Anggapan Ini Mungkin Membingungkan Pendefinisian Administrasi Publik, Termasuk Ruang Lingkupnya. Akan Tetapi Hal Ini Justru Menunjukkan Bahwa Dunia Administrasi Publik Itu Terus Mengalami Perkembangan Dan Justru Sulit Untuk Dipisahkan Dari Dunia Politik.

### **Dimensi Administasi Publik**

Administrasi Publik Adalah Seni Dan Ilmu Yang Mengacu Pada Hubungan Antara Suatu Organisasi Dengan Pihak-Pihak Pemangku Kepentingan Yang Melakukan Kegiatan Yang Telah Ditetapkan Untuk Mencapai Tujuan. Administrasi Publik Dibuat Untuk Menyampaikan Pelayanan Publik Yang Manfaatnya Dapat Dirasakan Masyarakat Menggunakan Peningkatan Profesionalisme Dari Badan Pemerintahan. Profesionalisme Dari Badan Pemerintahan Berupa Penerapan Teknik Efisiensi Dan Efektivitas Serta Tanggung Jawab Administrasi Publik. Administrasi Publik Untuk Mencapai Tujuannya Perlu Melakukan Aktivitas-Aktivitas Yang Dilakukan Bersama Dengan Para Stakeholder Untuk Tercapainya Tujuan Tentunya Terdapat Beberapa Dimensi Strategis. Administrasi Publik Dalam Mencapai Tujuannya Perlu Melakukan Beberapa Aktivitas-Aktivitas Dan Aktivitasaktivitas Yang Dilakukan Dalam Rangka Bekerjasama Dengan Para Stakeholder Tentunya Mencakup Beberapa Dimensi Yang Strategis. Menurut Keban (Ahmad Mustamir, Agus Hendrayadi, 2023 : 23) Administrasi Publik Yang Ideal Adalah Administrasi Yang Dapat Memanfaatkan Dengan Baik Keahlian Dan Ketrampilan Di Bidang Kebijakan, Bidang Pengorganisasi, Bidang Manajemn, Dibidang Moral Dan Erika, Bidang Lingkungan, Serta Dibidang Kinerja.

### **Lingkup Administrasi Publik**

Administrasi Sebagai Praktik Dan Administrasi Sebagai Ilmu Berbeda Waktu Berkembangnya. Sebagai Praktik, Administrasi Sudah Ada Sejak Manusia Ada Di Bumi Sebagai Tindak Administrasi. Sedangkan Sebagai Ilmu, Administrasi Dikenalkan Dan Dikembangkan Dari Negara-Negara Di Eropa Dan Amerika Serikat Tempat Ilmu Tersebut Bermula. Sebagai Ilmu, Administrasi Disyaratkan Memiliki Sejumlah Ketentuan Keilmuan. Pengetahuan Dapat Diakui Sebagai Ilmu Kalau Pengetahuan Tersebut Sudah Mempunyai Hukum-Hukum, Teori-Teori Atau Prinsip-Prinsip Yang Berlaku Universal. Pendapat Itulah Yang Melatarbelakangi Pihak-Pihak Yang Berpendapat Bahwa Administrasi Belumlah Kuat Kedudukannya Sebagai Ilmu. Namun Demikian, Pejuang-Pejuang Ilmu Yang Berusaha Menegaskan Jatidiri Administrasi Sebagai Ilmu Terus Melakukan Dengan Upaya Inovatif Seiring Paradigma Yang Berkembang. Di Indonesia, Beberapa Ahli Sejak Awal Telah Mengklasifikasikan Cabang Ilmu Administrasi. Sondang P. Siagian (1971; 19)(Warsono Et Al., 2019) Membagi Ilmu Administrasi Menjadi Tiga Cabang, Yakni : A. B. C.

### **Teori Pembangunan**

Pembangunan Pada Hakekatnya Merupakan Proses Transformasi Masyarakat Menuju Keadaan Yang Mendekati Tata Masyarakat Yang Dicitakan Sebagai Mana Yang Ada Di Konstitusi. Dalam Proses Transformasi Tersebut, Terdapat Dua Hal Yang Perlu Diperhatikan Yakni Berkelanjutan Dan Perubahan (Yamin Dan Haryono, 2017). Pembangunan Merupakan Salah Satu Istilah Yang Banyak Digunakan Dalam Kehidupan Sehari-Hari, Terutama Bila Itu Terkait Usaha Memajukan Kehidupan Masyarakat. Pada Awalnya, Konsep Itu Lebih Banyak Dikaitkan Dengan Kemajuan Material Atau Ekonomi. Namun, Saat Ini, Konsep Pembangunan Telah Mengalami Pergeseran Makna Ke Arah Yang Lebih Bermultidimensi. Dengan Demikian, Masalah Pembangunan Juga Harus Didekati Dengan Memanfaatkan Berbagai Disiplin Ilmu. Todaro (1983) Dalam (Suriyani, 2025)( Kasnawi & Ramli, 2016) Membuat Definisi Pembangunan Sebagai "Proses Multidimensi Yang Mencakup Perubahan-Perubahan Penting Dalam Struktur Sosial, Sikap- Sikap Rakyat, Dan Lembaga-Lembaga Nasional, Dan Juga Akselerasi

Pertumbuhan Ekonomi, Pengurangan Kesenjangan (Inequality), Dan Pemberantasan Kemiskinan Absolut". Selanjutnya Dikatakan Bahwa Pembangunan Itu Pada Hakikatnya Haruslah Menyuarakan Seluruh Nada Dasar (Gamet) Perubahan Yang Dengan Itu Pula Seluruh Sistem Sosial Seirama Atau Senada Dengan Berbagai Dasar Kebutuhan Dan Keinginan Masing-Masing Individual Dan Kelompok Masyarakat Yang Bernaung Di Dalam Sistem Itu, Bergerak Maju Dari Kondisi Kehidupan Yang Serba Kekurangan Dan Tidak Memuaskan, Menuju Kepada Kondisi Kehidupan Yang Jauh Lebih Baik, Baik Material Maupun Spiritual.

Pembangunan Merupakan Proses Yang Historical, Sebuah Proses Yang Bergulir Dari Waktu Ke Waktu Sehingga Tidak Akan Pernah Berhenti. Pembangunan Bukan Hanya Terjadinya Perubahan Struktur Fisik Atau Material, Melainkan Juga Menyangkut Perubahan Sikap Masyarakat. Pembangunan Harus Mampu Membawa Manusia Melampaui Pengutamaan Aspek-Aspek Materi Dalam Kehidupan (Afandi, 2019). Pembangunan Merupakan Suatu Proses Perubahan Sosial Secara Berencana Dengan Meliputiberbagai Dimensi Untuk Mengusahakan Kemajuan Dalam Rangka Kesejahteraan Ekonomi, Modernisasi, Kemajuan Bangsa, Wawasan Lingkungan Dan Bahkan Peningkatan Kualitas Manusia Untuk Memperbaiki Kualitas Hidup) (Fajri, 2017). Jadi Pembangunan Adalah Segala Upaya Yang Dilakukan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Baik Dalam Konteks Bidang Ekonomi Maupun Social Yang Bertujuan Untuk Mengurangi Kemiskinan Tanpa Merusak Lingkungan Atau Kehidupan Social. Pembangunan Merupakan Proses Historical, Sebuah Proses Yang Bergulir Dari Waktu Ke Waktu Sehingga Tidak Akan Pernah Berhenti. Pembangunan Bukan Hanya Terjadinya Perubahan Struktur Fisik Atau Material, Melainkan Juga Menyangkut Perubahan Sikap Masyarakat.

Pembangunan Harus Mampu Membawa Manusia Melalui Pengutamaan Aspek-Aspek Materi Dalam Kehidupan (Jamaludin, 2016). Pembangunan Dilakukan Melalui Beberapa Gabungan Proses Sosial, Ekonomi, Dan Institusional, Yang Mencakup Usaha-Usaha Untuk Mencapai Kehidupan Yang Lebih Baik. Pembangunan Jika Tidak Dibaringi Dengan Etika Maka Akan Menimbulkan Kekerasan Dan Sikap Tidak Peduli Terhadap Kepentingan Manusia Secara Umum, Termasuk Terhadap Alam/Lingkungan. Pembangunan Yang Hanya Fokus Pada Sektor Ekonomitidak Akan Memberi Nilai Bagi Kehidupan Manusia. Nasir & Si, (2021) Pembangunan Adalah Suatu Proses Multidimensional Yang Melibatkan Berbagai Perubahanperubahan Mendasar Dalam Struktur Sosial, Tingkah Laku Sosial, Dan Institusi Sosial, Disamping Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ketimpangan Pendapatan, Serta Pemberantasan Kemiskinan (Todaro, 2007). Pembangunan Memiliki Fungsi Dalam Membantu Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, Yang Menjadi Salah Satu Indikator Berubahnya Suatu Negara. Pembangunan Nasional Bangsa Indonesia Memiliki Tujuan Untuk Tercapainya Masyarakat Yang Makmur, Adil Dan Sejahtera.

### **Pembangunan Infrastruktur**

Istilah Infrastruktur Ini Lebih Mengarah Ke Infrastruktur Teknis Dan Fisik Yang Mendukung Jaringan Struktur Seperti Fasilitas Jalan, Air Bersih, Perlistrikan, Telekomunikasi, Pengelolaan Limbah, Secara Fungsional Dapat Memperlancar Aktivitas Ekonomi Masyarakat. Seperti Adanya Jalan Yang Baik Di Suatu Negara Maka Dapat Memperlancar Transportasi Pengiriman Bahan Baku Sampai Ke Pabrik Sesuai Tujuan. Maka Ini Disebut Infrastruktur Yang Disediakan Pemerintah Disebut Barang Publik, Selain Itu Seperti Jalan Tol Merupakan InfrZastruktur Yang Disediakan Oleh

Pemerintah (Nothdurft, 2024)(Stiglitz Dalam Hapsari, 2011). Definisi Infrastruktur Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Dapat Diartikan Sebagai Sarana Dan Prasarana Umum. Sarana Secara Umum Diketahui Sebagai Fasilitas Publik Seperti Rumah Sakit, Jalan, Jembatan, Sanitasi, Telpon, Dan Sebagainya. Dalam Ilmu Ekonomi Infrastruktur Merupakan Wujud Dari Publik Capital (Modal Publik) Yang Dibentuk Dari Investasi Yang Dilakukan Pemerintah. Infrastruktur Dalam Penelitian Ini Meliputi Jalan, Jembatan, Dan Sistem Saluran Pembuangan (Kurniawan, 2020). Pengertian Infrastruktur, Menurut American Public Works Association (Dimasyahputra, 2021) Infrastruktur Adalah Fasilitas-Fasilitas Fisik Yang Dikembangkan Atau Dibutuhkan Oleh Agen-Agen Publik Untuk Fungsi Fungsi Pemerintahan Dalam Penyediaan Air, Tenaga Listrik, Pembuangan Limbah, Transportasi Dan Pelayanan-Pelayanan Similar Untuk Memfasilitasi Tujuan-Tujuan Sosial Dan Ekonomi. Berdasarkan Pengertian Infrastruktur Tersebut Maka Infrastruktur Merupakan Sistem Fisik Yang Dibutuhkan Untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Manusia Dalam Lingkup Sosial Dan Ekonomi.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Tanjung Pude, Kecamatan Una-Una, Kabupaten Tojo Una-Una. Pemilihan lokasi didasarkan pada beberapa pertimbangan, di antaranya adanya permasalahan terkait pelaksanaan pembangunan desa melalui pemanfaatan Dana Desa. Selain itu, lokasi ini mudah dijangkau oleh berbagai moda transportasi, sehingga memudahkan proses penelitian. Peneliti juga merupakan penduduk setempat, yang tentunya mendukung kelancaran kegiatan. Waktu pelaksanaan penelitian berlangsung selama empat bulan, yaitu sejak Februari hingga Mei 2025. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan tahapan pengumpulan informasi, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Penelitian kualitatif bertujuan memahami realitas sosial dan sudut pandang individu atau kelompok berdasarkan perilaku, persepsi, serta permasalahan yang mereka hadapi.

Data yang digunakan terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung terhadap tujuh informan yang terdiri dari Kepala Desa, Kaur Keuangan, Kaur Perencanaan, anggota BPD, serta tiga orang masyarakat. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen tertulis yang tersedia di Kantor Desa Tanjung Pude serta dari berbagai referensi yang relevan dengan permasalahan penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung terhadap aktivitas partisipan, wawancara baik secara tatap muka maupun melalui media digital, serta dokumentasi yang mencakup arsip tertulis dan visual. Analisis data mengikuti tahapan menurut Sugiyono, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses ini membantu peneliti dalam menyusun informasi secara sistematis agar mudah dipahami dan dijadikan dasar dalam menjawab rumusan masalah penelitian.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Transparansi**

Transparansi Merupakan Suatu Prinsip Atau Nilai Yang Menekankan Keterbukaan, Kejelasan, Dan Ketersediaan Informasi Kepada Semua Pihak Yang Berkepentingan, Baik Dalam Konteks Pemerintahan, Organisasi, Maupun Kehidupan Sosial. Transparansi Berarti Bahwa Proses, Kebijakan, Serta Keputusan Yang Di Ambil Oleh Suatu Lembaga

Atau Individu Dapat Di Akses, Dipahami, Dan Di Awasi Oleh Publik Atau Pihak-Pihak Terkait Lainnya. Transparansi Adalah Memberikan Informasi Keuangan Yang Terbuka Dan Jujur Kepada Masyarakat Berdasarkan Pertimbangan Bahwa Masyarakat Memiliki Hak Untuk Mengetahui Secara Terbuka Dan Menyeluruh Atas Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Yang Dipercayakan kepadanya Dan Ketaatannya Pada Peraturan Perundang-Undangan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Dinyatakan Bahwa Keuangan Daerah Harus Dikelola Secara Tertib, Taat Pada Peraturan Perundang-Undangan, Efisien, Ekonomis, Efektif, Transparan, Dan Bertanggung Jawab Dengan Memperhatikan Asas Keadilan, Kepatuhan, Dan Manfaat Untuk Masyarakat (Nurhayati, 2017). Di Tingkat Desa Transparansi Merupakan Keterbukaan Pemerintah Desa Dalam Menyampaikan Informasi Kepada Masyarakat Desa Secara Jujur, Jelas, Dan Mudah Diakses. Terutama Yang Berkaitan Dengan Perencanaan, Pelaksanaan, Dan pertanggungjawaban Program-Program Desa, Serta Kebijakan Dan Keputusan Yang Mempengaruhi Kepentingan Masyarakat.

Berkaitan Dengan Transparansi, Maka Hasil Wawancara Dengan Informan Inisial (B) Selaku Kepala Desa Tanjung Pude Yang Mengungkapkan Bahwa:

*“Dalam Praktek Yang Kami Lakukan Garis Besarnya Pemerintah Desa Tanjung Pude Dan Bpd Serta Masyarakat Melakukan Beberapa Tahapan Musyawarah, Yang Pertama Adalah Musyawarah Jarring Aspirasi Masyarakat (Jaring Asmara) Ini Dilakukan Oleh Bpd Di Masing-Masing Keterwakilan Wilayah Untuk Menyerap Aspirasi Masyarakat Untuk Rencana Kerja Pemerintah Desa Setiap Tahun Dengan Mengacu Pada Rpjndes, Selanjutnya Di Bahas Di Bahas Ss Di Dalam Musyawarah Desa Untuk Menyepakati Bersama Masyarakat, Bpd Dan Pemerintah Desa Apa Saja Yang Menjadi Prioritas Pemberdayaan Dan Pembangunan (Padat Karya Tunai) Untuk Di Anggarakan Di Tahun Tahun Selanjutnya Dan Dimana Di Bentuk Tim Penyusun Rkpdes Untuk Bertanggungjawab Menyusun Dokumen Rkpdes Dan Pembentukan Tpk (Tim Pelaksana Kegiatan) Untuk Bertanggungjawab Terkait Dengan Pemberdayaan Dan Pembangunan Di Desa, Selanjutnya Musyawarah Rencana Kerja Pemerintah Desa (Rkpdes) Dimana Tim Penyusun Menyampaikan Kepada Masyarakat, Bpd Dan Pemerintah Terkait Dengan Kemampuan Anggaran Yang Direncanakan Berdasarkan Pagu Yang Ditetapkan Melalui Perbub Setiap Desa,,Selanjutnya Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrembang) Dimana Dalam Pelaksanaannya Memasukan Program Desa Yang Tidak Tercover Melalui Apbd I, Apbd li Dan Apbn”.* (Hasil Wawancara, B: 21 Juli 2025)

Dari Hasil Wawancara Dengan Kepala Desa, Dapat Disimpulkan Bahwa Pemerintah Desa Tanjung Pude Bersama Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dan Masyarakat Telah Menjalankan Proses Perencanaan Pembangunan Desa Secara Partisipatif Dan Terstruktur. Proses Ini Diawali Dengan Kegiatan *Jaring Aspirasi Masyarakat* (Jaring Asmara) Yang Dilakukan Oleh Bpd Di Masing-Masing Wilayah Keterwakilan Untuk Menghimpun Aspirasi Warga. Aspirasi Yang Terkumpul Kemudian Dibahas Dalam Musyawarah Desa Guna Menetapkan Prioritas Kegiatan Pemberdayaan Dan Pembangunan, Khususnya Yang Bersifat Padat Karya Tunai.

Selanjutnya Dibentuk Tim Penyusun Rkpdes Yang Bertanggung Jawab Menyusun Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa, Serta Tim Pelaksana Kegiatan (Tpk) Yang Mengelola Pelaksanaan Kegiatan. Setelah Itu, Dilaksanakan Musyawarah Rkpdes, Di Mana Tim Penyusun Memaparkan Rencana Kegiatan Dan Kemampuan Anggaran

Berdasarkan Pagu Indikatif Yang Ditetapkan Melalui Peraturan Bupati. Proses Ini Dilanjutkan Dengan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Untuk Mengusulkan Program Yang Belum Dapat Dibiayai Melalui Dana Desa, Apbd Kabupaten/Kota, Provinsi (Apbd I), Maupun Apbn.

Dengan Demikian, Perencanaan Pembangunan Di Desa Tanjung Pude Telah Melibatkan Seluruh Elemen Masyarakat Secara Transparan Dan Berjenjang, Guna Mewujudkan Pembangunan Desa Yang Lebih Tepat Sasaran Dan Berkelanjutan.

Selanjutnya Hasil Wawancara Dengan Informan Insial (Sr) Selaku Kepala Urusan Perencanaan Yang Mengungkapkan Bahwa:

*“ Mengenai Transparansi Pembangunan Di Desa Tanjung Pude Kami Selaku Aparatur Desa Sudah Berupaya Memberikan Keterbukaan Mengenai Pembangunan Seperti Yang Telah Di Pasang Pada Papan Informasi Pembangunan Dan Juga Kami Mengadakan Pertemuan Bersama Masyarakat. Tapi Pada Saat Kami Melakukan Pertemuan Hanya Sedikit Masyarakat Yang Datang Untuk Menghadiri Pertemuan Tersebut. (Hasil Wawancara,Sr: 21 Juli 2025 )*

Dari Hasil Wawancara Dengan Kepala Urusan Perencanaan, Dapat Di Simpulkan Upaya Transparansi Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Tanjung Pude Telah Dilakukan Oleh Aparatur Desa Melalui Penyampaian Informasi Pada Papan Informasi Pembangunan Serta Dengan Dengan Mengadakan Pertemuan Bersama Masyarakat. Namun, Epektifitas Transparansi Tersebut Masih Kurang Optimal Karena Tingkat Pastiisipasi Masyarakat Dalam Menghadiri Pertemuan Masih Tergolong Rendah.

Selanjutnya Hasil Wawancara Dengan Informan Inisial (Sh) Selaku Kepala Urusan Keuangan Yang Mengungkapkan Bahwa:

*“ Secara Umum Kami Sudah Berusaha Untuk Transparan, Seperti Memasang Papan Informasi Proyek Dan Membuat Laporan Penggunaan Anggaran. Namun Saya Akui Penyampaian Informasi Kepada Masyarakat Belum Maksimal. Seperti, Tidak Semua Masyarakat Yang Hadir Saat Musyawarah Desa, Dan Belum Semua Data Keuangan Bisa Di Akses Secara Terbuka. Ini Menjadi Catatan Kami Apalagi Banyak Masyarakat Yang Tidak Tahu Sejauh Mana Penggunaan Dana Pembangunan. (Hasil Wawancara,Sh: 21 Juli 2025 )*

Dari Hasil Wawancara Dengan Kepala Urusan Keuangan, Dapat Di Simpulkan Bahwa Pemerintah Desa Secara Umum Telah Berupaya Mewujudkan Transparansi, Antara Lain Melalui Pemasangan Informasi Proyek Dan Pelaporan Penggunaan Anggaran. Namun Demilian, Penyampaian Informasi Kepada Masyarakat Di Nilai Masih Belum Maksimal. Hal Ini Terlihat Dari Rendahnya Kehadiran Msyarakat Dalam Kegiatan Sosialisasi Serta Kurangnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Dan Pemanfaatn Anggaran Pembangunan Yang Telah Di Laksanakan.

Selanjutnya Hasil Wawancara Dengan Informan Insial (Th) Selaku Masyarakat Yang Bekerja Sebagai Penjual Makanan Yang Mengungkapkan Bahwa:

*“ Saya Kurang Tau Soal Pembangunan Apa Saja Yang Akan Di Bangun Di Desa Ini Dan Berapa Anggarannya Tapi Saya Lihat Soal Pembangunan Jalan Di Desa Sini Belum Seluruhnya Di Beken Sudah Satu Tahun Ini Torang Masyarakat Menunggu Itu Jalan Mo Di Kase Lanjut Tapi Sampe Sekarang Depe Jalan Itu Msi Begitu Saja Dan Menurut Saya Itu Jalan Yang Sebagian Rusak Sangat Mengganggu Aktivitas Apalagi Saya Ba Jual Makanan Biasanya Ada Yang Mo Ba Suru Deliv Makanan Itu Saya Yang Mo Antar Kadang Sy Mo Amper Jato Dari Motor Karna Biasa Sy Baku Riki*

*Baru Mo Dapa Lewat Jalan Yang Rusak. (Hasil Wawancara, Th: 21 Juli 2025 )*

Dari Hasil Wawancara Dengan Masyarakat Yang Berprofesi Sebagai Penjual Makanan Dapat Di Simpulkan Bahwa Masyarakat Masih Kurang Mendapatkan Informasi Terkait Trencana Dan Anggaran Pembangunan Desa. Warga Juga Mengeluhkan Pembangunan Jalan Yang Masih Belum Sepenuhnya Di Selesaikan, Meskipun Telah Lama Di Nantikan. Kondisi Jalan Yang Rusak Di Nilai Sangat Mengganggu Aktivitas Segari-Hari, Terutama Bagi Warga Yang Bergantung Pada Akses Jalan Untuk Menjalankan Usahanya, Seperti Pengantaran Makanan. Hal Ini Menunjukkan Adanya Keterbatasan Transparansi Informasi Serta Kurangnya Tindak Lanjut Dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Di Desa.

Selanjutnya Hasil Wawancara Dengan Informan Inisial (An) Selaku Masyarakat Yang Bekerja Sebagai Ibu Rumah Tangga Yang Mengungkapkan Bahwa:

*“ Kalo Soal Pembangunan Pemerintah Desa Sudah Infokan Dorang Mo Beken Apa Setiap Tahun Dan So Bisa Di Lia Dari Papan Informasi Proyek Yang Mereka Pasang. Biasanya Juga Pemerintah Desa Itu Mengundang Masyarakat Untuk Membahas Soal Pembangunan Tapi Beberapa Kali Sy Tidak Sempat Hadir Jadi Saya Kurang Tau Apa Saja Yang Bahas Dalam Musyawarah Itu. (Hasil Wawancara, An: 21 Juli 2025)*

Dari Hasil Wawancara Dengan Masyarakat Yang Berprofesi Sebagai Ibu Rumah Tangga Dapat Di Simpulkan Bahwa Pemerintah Desa Sebenarnya Sudah Memberikan Informasi Terkait Pembangunan Setiap Tahunnya Melalui Papan Informasi Dan Undangan Musyawarah. Namun Keterbatasan Partisipasi Warga, Seperti Ketidakhadiran Dalam Musyawarah, Menjadi Faktor Yang Menyebabkan Kurangnya Pemahaman Terhadap Isi Dan Rencana Pembangunan Desa. Hal Ini Yang Mengindikasikan Bahwa Transparansi Sudah Di Upayakan, Epektifitas Belum Sepenuhnya Tercapai Karena Rendahnya Partisipasi Aktif Masyarakat Dalam Kegiatan Desa.

Selanjutnya Hasil Wawancara Dengan Informan Inisial (C) Selaku Masyarakat Yang Bekerja Sebagai Nelayan Mengungkapkan Bahwa:

*“ Pembangunan Di Desa Sini Saya Rasa Sudah Cukup Bagus Dan Sesuai Dengan Apa Yang Pemerintah Desa Pajang Di Papan Informasi Pembangunan. Tapi Saya Tidak Tau Apakah Dana Yang Mereka Pakai Sesuai Dengan Apa Yang Di Anggarkan Saya Kurang Tau Jela Karna Sy Juga Jarang Sekali Mo Ba Cari Tau Tentang Itu Karna Sy Bekerja Sebagai Nelayan Yang Tiap Hari Itu Di Laut. (Hasil Wawancara, C: 21 Juli 2025 )*

Dari Hasil Wawancara Dengan Masyarakat Yang Berprofesi Sebagai Nelayan Dapat Di Simpulkan Bahwa Secara Fisik Pembangunan Di Desa Di Nilai Sudah Cukup Baik Dan Sesuai Dengan Informasi Yang Tercantum Di Dalam Papan Pembangunan. Namun Demikian, Terdapat Keterbatasan Pengetahuan Terkait Penggunaan Dan Kesesuaian Anggaran Pembangunan. Hal Ini Di Sebabkan Oleh Rendahnya Akses Terhadap Informasi Serta Keterbatasan Waktu Karena Pekerjaan Nelayan Yang Menuntut Berada Di Laut Hampir Setiap Hari. Kondisi Ini Mencerminkan Bahwa Meskipun Transparansi Informasi Tersedia, Belum Semua Lapisan Masyarakat Dapat Menjangkau Atau Memanfaatkannya Secara Optimal.

Berdasarkan Keseluruhan Dari Wawancara Dengan Beberapa Informan Mengenai Transparansi Dapat Di Simpulkan Bahwa Transparansi Pembangunan Di Desa Tanjung

Pude Menunjukkan Bahwa Pemerintah Desa Telah Berupaya Menerapkan Prinsip Transparansi Melalui Berbagai Mekanisme Seperti Musyawarah Berjenjang (Jaring Asmara, Rkpdes, Dan Musrenbangdes), Pemasangan Papan Informasi Pembangunan, Serta Penyusunan Laporan Penggunaan Anggaran, Namun Efektivitas Transparansi Tersebut Masih Belum Optimal Karena Rendahnya Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Musyawarah, Kurangnya Pemahaman Warga Terhadap Pemanfaatan Anggaran Pembangunan, Serta Keterbatasan Akses Informasi Bagi Sebagian Masyarakat Yang Memiliki Kendala Waktu Dan Aktivitas Pekerjaan, Sehingga Meskipun Infrastruktur Transparansi Sudah Tersedia, Belum Semua Lapisan Masyarakat Dapat Memanfaatkannya Secara Maksimal Untuk Mengawasi Dan Memahami Proses Pembangunan Desa.

### **Akuntabilitas**

Akuntabilitas Adalah Suatu Prinsip Atau Konsep Yang Mengacu Pada Kewajiban Seseorang Atau Suatu Pihak (Individu, Lembaga, Atau Organisasi) Untuk Mempertanggungjawabkan Segala Tindakan, Keputusan, Dan Hasil Yang Telah Di Lakukan Kepada Pihak Yang Memiliki Wewenang Atau Berkepentingan. Terkait Dengan Akuntabilitas Hasil Wawancara Dengan Informan Inisial (B) Selaku Kepala Desa Mengungkapkan Bahwa:

*" Akuntabilitas Dapat Dicapai Untuk Meningkatkan Pembangunan Pembangunan Infrastruktur Di Dalam Desa, Dengan Melibatkan Seluruh Masyarakat Dan Bpd Tentunya Bentuk Interpretasi, Keterbukaan Informasi Dan Melakukan Semua Tahapan Yang Di Atur, Maka Kami Meyakini Jika Semua Itu Di Lakukan Secara Terbuka Maka Partisipasi Masyarakat Terus Meningkat Untuk Perbaikan Desa Di Setiap Tahun. (Hasil Wawancara, B: 21 Juli 2025)*

Dari Hasil Wawancara Dengan Kepala Desa Dapat Di Simpulkan Bahwa Akuntabilitas Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Dapat Tercapai Melalui Keterbukaan Informasi, Pelibatan Masyarakat, Serta Peran Aktif Badan Permusyawaratan Desa (Bpd). Kepala Desa Meyakini Bahwa Setiap Tahapan Pembangunan Dilakukan Secara Terbuka Dan Sesuai Aturan, Maka Partisipasi Masyarakat Akan Meningkat, Sehingga Proses Pembangunan Desa Dapat Berjalan Lebih Baik Dan Berkelanjutan Setiap Tahunnya.

Selanjutnya Hasil Wawancara Dengan Informan Inisial (Sh) Selaku Kepala Urusan Keuangan Mengungkapkan Bahwa:

*" Secara Umum Pembangunan Sudah Berjalan, Tapi Memang Masih Banyak Yang Perlu Di Benahi. Dari Sisi Perencanaan Hingga Pelaporannya, Kadang Masih Kurang Maksimal. Misalnya Dalam Pembangunan Jalan Desa, Ada Beberapa Hal Teknis Yang Tidak Tertuang Secara Rinci Dalam Laporan Pertanggungjawaban. Akuntabilitas Masih Menjadi Tantangan, Masih Ada Kegiatan Yang Laporrannya Yang Belum Sepenuhnya Lengkap Atau Terlambat Di Susun. (Hasil Wawancara, Sh: 21 Juli 2025)*

Dari Hasil Wawancara Dengan Kepala Urusan Keuangan Dapat Di Simpulkan Bahwa Meskipun Pembangunan Desa Secara Umum Telah Berjalan, Masih Terdapat Kekurangan Aspek Perencanaan Dan Pelaporan. Dalam Beberapa Kasus Seperti Pembangunan Jalan Desa, Terdapat Rincian Teknis Yang Belum Tercantum Secara Lengkap Dalam Laporan Pertanggungjawaban. Hal Ini Menyebabkan Akuntabilitas Menjadi Tantangan, Teruma Karena Penyusunan Laporan Yang Belum Lengkap Atau

Terlambat, Sehingga Menimbulkan Keraguan Dari Masyarakat Terhadap Transparansi Dan Kejelasan Punggunaan Dana Pembanunan.

Selanjutnya Hasil Wawancara Dengan Informan Inisial (Sr) Selaku Kepala Urusan Perencanaan Mengungkapkan Bahwa:

*“ Pembangunan Sudah Di Lakukan Seperti Apa Yang Sudah Ada Di Papan Informasi Proyek Contohnya Pembangunan Jalan, Pembangunan Jembatan Dan Tanggul Itu Sudah Di Bangun Akan Tetapi Pembangunannya Itu Belum Sepenuhnya Di Buat Karna Semua Itu Menggunakan Dana Desa Secara Bertahap Sesuai Kemampuan Anggaran Setiap Tahunnya. (Hasil Wawancara, Sr: 21 Juli 2025)*

Dari Hasil Wawancara Dengan Kepala Urusan Perencanaan Dapat Di Simpulkan Bahwa Pelaksanaan Pembangunan Desa, Seperti Pembangunan Jalan Telah Di Lakukan Sesuai Informasi Yang Tercantum Dalam Papan Proyek. Namun, Pembangunan Tersebut Belum Sepenuhnya Selesai Karena Dilakukan Secara Bertahap Sesuai Dengan Kemampuan Anggaran Desa Setiap Tahunnya. Hal Ini Menunjukkan Bahwa Keterbatasan Anggaran Menjadi Faktor Utama Dalam Penyelesaian Infrastruktur Secara Menyeluruh.

Selanjutnya Hasil Wawancara Yang Dengan Informan Inisial (Ss) Selaku Bpd Mengungkapkan Bahwa:

*“ Pengawasan Sudah Kami Lakukan, Hanya Saja Kami Dari Pihak Bpd Cuman Melihat Apakah Pembangunan Yang Di Lakukan Sudah Terlaksanakan Atau Belum Tapi Kami Tidak Melihat Dari Sisi Anggaran Yang Di Gunakan Apakah Sesuai Dengan Apa Yang Menjadi Hasil Rapat Bersama. (Hasil Wawancara, Ss: 21 Juli 2025)*

Dari Hasil Wawancara Dengan Bpd Dapat Di Simpulkan Bahwa Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Telah Dilakukan, Terutama Dalam Hal Memastikan Apakah Pembangunan Pembangunan Fidik Telah Dilakukan Atau Belum. Namun, Pengawasan Belum Menyentuh Aspek Penggunaan Anggaran Secara Menyeluruh, Sehingga Belum Dapat Dipastikan Apakah Realisasi Anggaran Sesuai Dengan Hasil Kesepakatan Dalam Rapat. Hal Ini Menunjukkan Bahwa Fungsi Pengawasan Bpd Masih Terbatas Dan Perlu Di Tingkatkan, Terutama Dalam Hal Akuntabilitas Keuangan Pembangunan Desa.

Selanjutnya Hasil Wawancara Dengan Informan Inisial (Th) Selaku Masyarakat Yang Bekerja Sebagai Penjual Makanan Mengungkapkan Bahwa:

*“ Untuk Pertanggungjawaban Dari Pemerintah Desa Mengenai Pembangunan Jalan Yang Hanya Sebagian Di Buat Saya Rasa Masih Kurang Adanya Pemberitahuan Soal Pembangunan Jalan Itu Berapa Anggaran Yang Seharusnya Di Pakai Untuk Pembangunan Jalan Dan Kapan Pembangunan Jalan Itu Akan Di Selesaikan. (Hasil Wawancara, Th: 21 Juli 2025)*

Dari Hasil Wawancara Dengan Masyarakat Yang Berprofesi Sebagai Penjual Makanan Dapat disimpulkan bahwa Masih Terdapat Kekurangan Dalam Hal Pertanggungjawaban Dan Penyampaian Informasi Dari Pemerintah Desa Terkait Pembangunan Jalan Yang Belum Di Selesaikan. Warga Merasa Tidak Mendapatkan Kejelasan Mengenai Besaran Anggaran Yang Di Gunakan Maupun Waktu Penyelesaian Pembanguna. Hal Ini Mencerminkan Lemahnya Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pelaksanaan Pembangunan, Yang Berdampak Pada Ketidakpuasan Dan Kebingungan Di Kalangan Masyarakat. Berdasarkan Keseluruhan Dari Wawancara Dengan Beberapa Informan Mengenai Akuntabilitas Pembangunan Di Desa Tanjung Pude Menunjukkan

Bahwa Meskipun Kepala Desa Memiliki Komitmen Untuk Mencapai Akuntabilitas Melalui Keterbukaan Informasi Dan Pelibatan Masyarakat Serta Bpd, Namun Dalam Praktiknya Masih Terdapat Berbagai Kendala Seperti Ketidaklengkapan Laporan Pertanggungjawaban Yang Mencakup Rincian Teknis Pembangunan, Keterlambatan Penyusunan Laporan, Pengawasan Bpd Yang Hanya Terfokus Pada Aspek Fisik Pembangunan Tanpa Menyentuh Akuntabilitas Keuangan, Serta Pembangunan Infrastruktur Yang Dilakukan Secara Bertahap Karena Keterbatasan Anggaran Yang Menyebabkan Masyarakat Tidak Mendapatkan Informasi Yang Jelas Mengenai Besaran Anggaran Dan Jadwal Penyelesaian Proyek, Sehingga Akuntabilitas Pembangunan Desa Belum Dapat Tercapai Secara Optimal Dan Menimbulkan Ketidakpuasan Serta Kebingungan Di Kalangan Masyarakat.

### **Partisipasi Dalam Halnya Pengawasan**

Partisipasi Dalam Halnya Pengawasan Adalah Keterlibatan Aktif Masyarakat Atau Pihak-Pihak Terkait Dalam Proses Pengawasan Terhadap Suatu Kegiatan Atau Program, Seperti Pembangunan Infrastruktur Desa Yang Di Biyai Dari Dana Desa.

Partisipasi Dalam Pengawasan Berarti Masyarakat Tidak Hanya Menjadi Penonton, Tetapi Ikut Serta Dalam Mengawasi, Mengontrol, Memberi Masukan, Dan Mengkritisi Jalannya Program Atau Kegiatan Yang Sedang Dilaksanakan. Ini Mencerminkan Bentuk Demokrasi Partisipasi, Dimana Rakyat Ikut Berperan Mengawal Jalannya Pembangunan. Terkait Partisipasi Dalam Halnya Pengawasan Dari Hasil Wawancara Dengan Informan Inisial (B) Selaku Kepala Desa Megungkapkan Bahwa:

*“ Kalau Berbicara Soal Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan, Saya Melihat Memang Masih Perlu Di Tingkatkan. Masyarakat Sebenarnya Punya Hak Dan Ruang Untuk Ikut Mengawasi, Apalagi Semua Kegiatan Pembangunan Di Biyai Dari Dana Desa Yang Notabene Uang Rakyat. Kami Di Desa Selalu Terbuka, Misalnya Melalui Musyawarah Desa Dan Papan Informasi Kegiatan. Tapi Kenyataannya, Tidak Semua Warga Terlibat Atau Aktif Menanyakan Atau Mengecek Langsung Pelaksanaan Kegiatan. Beberapa Warga Memang Ada Yang Proaktif, Mereka Datang Langsung Bertanya Ke Kami Atau Perangkat Desa Lainnya Jika Ada Kegiatan Pembangunan. Namun, Masih Banyak Juga Yang Kurang Peduli Atau Mungkin Merasa Itu Bukan Urusan Mereka. (Hasil Wawancara, B: 21 Juli 2025)*

Dari Hasil Wawancara Dengan Kepala Desa Dapat Di Simpulkan Bahwa Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pembangunan Desa Masih Perlu Di Tingkatkan. Pemerintah Desa Telah Memberikan Ruang Dan Akses Bagi Masyarakat Untuk Terlibat Melalui Musyawarah Desa Dan Papan Informasi Kegiatan. Namun, Keterlibatan Masyarakat Belum Merata. Hanya Sebagian Kecil Warga Yang Proaktif Melakukan Pengawasan, Sementara Sebagian Besar Lainnya Kurang Peduli Atau Merasa Tidak Memiliki Peran Peran Dalam Pengawasan. Hal Ini Menunjukkan Bahwa Meskipun Transparansi Telah Di Upayakan, Partisipasi Masyarakat Masih Menjadi Tantangan Yang Perlu Mendapat Perhatian Lebih Lanjut.

Selanjutnya Hasil Wawancara Dengan Informan Inisial (Sh) Selaku Kepala Urusan Keuangan Mengungkapkan Bahwa:

*“ Kalau Di Lihat Dari Pelaksanaan Di Lapangan, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Penggunaan Dana Desa, Terutama Pada Pembangunan Infrastruktur, Masih Tergolong Rendah. Masyarakat Sering Kali Hanya Mengetahui Bahwa Ada Pembangunan, Tapi Tidak Ikut Aktif Dalam Mengawasi Jalanya Proses*

*Pembangunan Itu Sendiri. Misalnya Mereka Tidak Menanyakan Soal Anggaran, Waktu Pelaksanaan, Atau Kualitas Hasil Pembangunan (Hasil Wawancara, Sh: 21 Juli 2025).*

Dari Hasil Wawancara Dengan Kepala Urusan Keuangan Dapat Di Simpulkan Bahwa Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Penggunaan Dana Desa, Khususnya Dalam Pembangunan Infrastruktur, Masih Rendah. Masyarakat Cenderung Pasif Dan Hanya Mengetahui Adanya Kegiatan Pembangunan Tanpa Terlibat Secara Aktif Dalam Mengawasi Proses Pelaksanaannya. Hal Ini Terlihat Dari Minimnya Pertanyaan Atau Perhatian Masyarakat Terhadap Aspek Penting Seperti Besaran Anggaran, Waktu Pelaksanaan, Maupun Kualitas Hasil Pembangunan. Kurangnya Keterlibatan Ini Dapat Berdampak Pada Lemahnya Pengawasan Dan Potensi Terjadinya Penyimpangan Dalam Pemanfaatan Dana Desa.

Selanjutnya Hasil Wawancara Dengan Informan Inisial (Sr) Selaku Kepala Urusan Perencanaan Mengungkapkan Bahwa:

*" Saya Melihat Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Memang Masih Belum Optimal. Ketika Proses Perencanaan, Masyarakat Biasanya Cukup Aktif Dalam Memberikan Usulan Saat Musyawarah. Namun Saat Pembangunan Sudah Berjalan, Keterlibatan Mereka Dalam Mengawasi Pelaksanaan Kegiatan Itu Masih Kurang. Kami Dari Pihak Desa, Terutama Bagian Perencanaan, Sebenarnya Sangat Terbuka Terhadap Masukan Dari Warga. Kami Selalu Berharap Masyarakat Tidak Hanya Aktif Saat Mengusulkan Kegiatan, Tetapi Juga Turun Mengawal Pelaksanaannya. (Hasil Wawancara, Sr: 21 Juli 2025)*

Dari Hasil Wawancara Dengan Kepala Urusan Perencanaan Dapat Di Simpulkan Bahwa Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pembangunan Desa Belum Optimal. Masyarakat Umumnya Aktif Pada Tahap Perencanaan, Terutama Saat Musyawarah Untuk Menyampaikan Usulan Kegiatan. Namun, Keterlibatan Mereka Menurun Saat Pembangunan Mulai Dilaksanakan. Pihak Desa, Khususnya Bagian Perencanaan, Sebenarnya Terbuka Terhadap Masukan Selama Proses Pelaksanaan, Tetapi Minimnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Menunjukkan Adanya Kesenjangan Antara Peran Yang Di Harapkan Dan Kenyataan Di Lapangan. Hal Ini Menjadi Tantangan Dalam Menciptakan Pembangunan Yang Transparan, Akuntabel, Dan Sesuai Harapan Bersama.

Selanjutnya Hasil Wawancara Dengan Informan Inisial (Ss) Selaku Bpd Mengungkapkan Bahwa:

*" Kalau Dari Pengamatan Kami Sebagai Bpd, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Masih Tergolong Rendah. Masyarakat Umumnya Hanya Aktif Saat Proses Musyawarah Perencanaan Desa, Seperti Saat Mengusulkan Pembangunan Jalan Atau Fasilitas Lainnya. Tapi Ketika Proyek Sudah Berjalan, Tidak Banyak Warga Yang Mau Terlibat Untuk Memantau Atau Memberi Masukan Secara Langsung. (Hasil Wawancara, Ss: 21 Juli 2025)*

Dari Hasil Wawancara Dengan Bpd Dapat Di Simpulkan Bahwa Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pembangunan Desa Masih Tergolong Rendah. Masyarakat Cenderung Hanya Aktif Saat Musyawarah Perencanaan, Seperti Saat Mengusulkan Pembangunan Jalan Atau Fasilitas Lainnya, Namun, Ketika Proyek Telah Berjalan, Keterlibatan Mereka Dalam Memantau Atau Memberikan Masukan Secara Langsung Menjadi Sangat Minim. Hal Ini Menunjukkan Adanya Ketidakseimbangan Antara

Angtusiasme Awal Masyarakat Dalam Perencanaan Dan Kepedulian Mereka Terhadap Pelaksanaan. Kondisi Ini Menjadi Pertimbangan Bagi Bpd, Karena Partisipasi Aktif Masyarakat Sangat Penting Untuk Memastikan Pembangunan Berjalan Sesuai Rencana Dan Kebutuhan.

Berdasarkan Keseluruhan Dari Wawancara Dengan Beberapa Informan Mengenai Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pembangunan Di Desa Tanjung Pude Menunjukkan Bahwa Meskipun Pemerintah Desa Telah Menyediakan Ruang Dan Akses Bagi Masyarakat Untuk Terlibat Dalam Pengawasan Melalui Musyawarah Desa Dan Papan Informasi Kegiatan, Namun Partisipasi Masyarakat Masih Tergolong Rendah Dan Tidak Merata Karena Hanya Sebagian Kecil Warga Yang Proaktif Melakukan Pengawasan Dengan Menanyakan Aspek-Aspek Penting Seperti Anggaran, Waktu Pelaksanaan, Dan Kualitas Hasil Pembangunan, Sementara Sebagian Besar Masyarakat Cenderung Pasif Dan Kurang Peduli Terhadap Proses Pelaksanaan Pembangunan Setelah Tahap Perencanaan Selesai, Meskipun Mereka Aktif Saat Musyawarah Perencanaan Untuk Mengusulkan Kegiatan Pembangunan, Sehingga Terjadi Ketidakseimbangan Antara Antusiasme Awal Dalam Perencanaan Dan Kepedulian Terhadap Pengawasan Pelaksanaan Yang Berdampak Pada Lemahnya Kontrol Masyarakat Dan Potensi Terjadinya Penyimpangan Dalam Pemanfaatan Dana Desa.

## **KESIMPULAN**

Bahwa upaya transparansi dan partisipasi dalam pembangunan di Desa Tanjung Pude telah dirancang secara sistematis melalui berbagai mekanisme seperti jaring aspirasi masyarakat, musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes), serta penyediaan informasi publik. Meskipun secara konsep dan komitmen aparatur desa tergolong baik, implementasinya masih menghadapi kendala, terutama rendahnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan. Pembangunan infrastruktur yang dilakukan secara bertahap akibat keterbatasan anggaran menimbulkan ketidakpastian dan ekspektasi berlebihan dari masyarakat. Selain itu, pengawasan oleh BPD masih terbatas pada aspek fisik dan belum menyentuh pengelolaan anggaran secara menyeluruh, sementara komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat dinilai kurang efektif. Masyarakat cenderung pasif dalam pengawasan, yang berdampak pada lemahnya kontrol sosial dan berpotensi membuka peluang penyimpangan penggunaan Dana Desa. Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik demokrasi partisipatif di tingkat desa masih belum optimal dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa secara menyeluruh.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Afandi, S. A. (2019). Teori Pembangunan. In *Universitas Terbuka*.
- Ahmad Mustamir, Agus Hendrayadi, I. H. (2023). Teori Administrasi Publik Pengantar. In *Administrasi Negara Publik*.
- Dimasyahputra, A. S. (2021). Kualitas Pelayanan Jalan Tol (Studi Kasus: Jalan Tol Soroja). *Skripsi*, 3(April), 49-58.
- Fajri, L. M. N. F. (2017). Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Jalan Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa (Studi Kasus di Desa Jenggala Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara). *Jurnal SIKAP*, 1(April), 11-22.
- Hisamuddin, L. O., & Andriani, R. (2023). *Perkembangan Teori Administrasi Publik*. deepublish.
- Kasnawi, M. T., & Ramli. (2016). Konsep dan Teori Pembangunan. *Pembangunan*

*Masyarakat Desa Dan Kota, 1–52.*

- Kurniawan, C. (2020). Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Berdasarkan Kondisi Dan Potensi Wilayah Desa Plampang, Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa Tahun 2018 Disusun. In *Satukan Tekad Menuju Indonesia Sehat*.
- Nasir, D. R. S. B., & Si, M. (2021). *Diktat Teori Pembangunan (Badrudin)*.
- Nothdurft, T. (2024). Infrastruktur. *Handbuch Demokratische Republik Kongo*, 361–370. [https://doi.org/10.57088/978-3-7329-9568-4\\_20](https://doi.org/10.57088/978-3-7329-9568-4_20)
- Nurhayati, N. (2017). Analisis Teori Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah di Indonesia. *Jurnal Trias Politika*, 1(2). <https://doi.org/10.33373/jtp.v1i2.1062>
- Sarjito, A. (2024). *DASAR-DASAR ADMINISTRASI PUBLIK*. Indonesia Emas Group.
- Suriyani, B. B. (2025). kinerja pegawai dalam meningkatkan kualitas pelayanan pada kantor urusan agama kecamatan kambu. *REZ PUBLICA*, 11(1), 31–43.
- Warsono, H., Astuti, R. S., & Marom, A. (2019). Teori Administrasi. *Ilmu Administrasi Dan Ilmu Administrasi Negara*, Surabaya:Erlangga.